

(Mendorong Komitmen Parapihak Lewat Integrasi Kebijakan
Pembangunan Daerah untuk Pengelolaan dan Perlindungan Eksosistem
Keanekaragaman Hayati di Bantimurung-Bulusaraung)

JURnaL Celebes



LAPORAN AKHIR PROGRAM

(Juli 2016-September 2017)

I. INFORMASI PROGRAM

<u>Wilayah Pendanaan</u>	:	Maros dan Pangkep, Koridor Sulawesi Selatan Bagian Selatan
KBA	:	Bantimurung Bulusaraung
Strategic Direction(s)	:	2. Perlindungan tapak
<u>Nama Proyek</u>	:	Mendorong Komitmen Parapihak Lewat Integrasi Kebijakan Pembangunan Daerah untuk Pengelolaan dan Perlindungan Eksosistem Keanekaragaman Hayati di Bantimurung-Bulusaraung
<u>Nomor Laporan</u>	:	02
<u>Periode waktu</u>	:	Juli 2016 – September 2017 (1 tahun + NCE)
<u>Disampaikan oleh</u>	:	Badauni AP (Koordinator Pelaksana Kegiatan)
<u>Tanggal</u>	:	7 Oktober, 2017

Hibah CEPF:

(a) dalam USD: 14,636,92

(b) dalam mata uang lokal (Rp) : 190,280,000

Kontribusi Mitra: berupa *In kind* meliputi alokasi staff, kantor dan perlengkapan pendukung kerja

Kontribusi donor (program) lain (jika ada): -

Periode program: Juli 2016 – September 2017 (1 tahun + 1 bulan NCA)

Lembaga pelaksana (mitra): JURnaL Celebes

II. RINGKASAN

Program mulai dilaksanakan Agustus 2016, setelah penandatanganan kontrak pada 15 Juli 2016. Kegiatan pertama adalah audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Namun, rencana audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Maros tidak dilaksanakan. Pihak Bupati Maros meminta untuk tidak perlu melakukan audiensi, karena nantinya Bupati Maros akan langsung menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan JURnaL Celebes dan memberi sambutan. Meski belakangan Bupati Maros tidak sempat menghadiri undangan membuka kegiatan FGD parapihak.

Proses penyesuaian waktu dengan pejabat pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri. Karenanya persiapan sosialisasi dan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep membutuhkan waktu beberapa minggu karena menyesuaikan jadwal dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sebagai kegiatan pertama di Kabupaten Pangkep baru terlaksana pada 5 September 2016. Di Kabupaten Maros kegiatan FGD justru tertunda hingga Januari 2017, karena menyesuaikan kesempatan Bupati Maros untuk hadir dan memberi sambutan. Meski demikian, saat pelaksanaan kegiatan, Bupati Maros hanya diwakili, dan di antaranya SKPD kunci tidak sempat menghadiri undangan kegiatan FGD. Dalam situasi ini mengesankan bahwa pemerintah daerah belum memberikan perhatian dan dukungan maksimal atas program atas proyek ini.

Walaupun demikian, FGD yang dilaksanakan memperoleh masukan-masukan dan gagasan yang mengarah pada tujuan akhir dari proyek, yakni pentingnya dukungan kebijakan dan keterlibatan parapihak untuk melindungi dan melestarikan kawasan karst di Maros dan Pangkep. Ada gagasan bahwa ke depan, upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem kawasan karst Maros dan Pangkep membutuhkan regulasi khusus.

Katika terkendala dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran pemerintah daerah, kegiatan kemudian difokuskan pada seri diskusi bulanan (*output 1.5*). Lewat seri diskusi bulanan memperoleh input/masukan dan gagasan parapihak untuk upaya perlindungan dan pelestarian kawasan karst di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.

Terkait dengan faktor kesiapan dan peran aktif pemerintah daerah pula, pada rentang waktu enam bulan pertama hingga selesai, kegiatan perumusan kajian awal (*output 1.2*) hanya dilaksanakan untuk Kabupaten Pangkep. Demikian juga dengan kegiatan strategis perwakilan SKPD (*output 2.3*) belum sempat dilaksanakan pada enam bulan pertama.

Untuk kegiatan inisiasi dan memberi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kepada SKPD terkait (*output 2.1*) sulit untuk dilaksanakan pada enam bulan pertama ini karena implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Seperti diketahui, dua SKPD kunci untuk sasaran program ini yakni Dinas Kehutanan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah “dilebur” dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai tindak lanjut dari target output ini, JURnaL Celebes berupaya untuk terlibat dalam pembentukan kelembagaan baru oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst Maros Pangkep. SKPD ini telah dibantu dan JURnaL Celebes mengikuti konsultasi publik untuk penguatan UPTD ini. Selanjutnya JURnaL Celebes akan berupaya memberikan masukan-masukan dalam proses penguatan dan implementasi UPTD ini. Namun, hingga akhir

program, KEE ini belum mempunyai kantor, sarana dan prasarana, serta belum beroperasi. Dengan demikian, upaya JURnaL Celebes dalam penguatan institusi ini belum bisa terlaksana.

Permohonan Penambahan Waktu NCE

Hingga akhir Juli 2017, JURnaL Celebes mengajukan penambahan waktu pelaksanaan kegiatan tanpa menambah biaya kegiatan (No Cost Extension/NCE) hingga 30 September 2017. Penambahan waktu untuk melaksanakan kegiatan tersisa terutama workshop parapihak dan penyusunan rekomendasi program berupa kertas kebijakan (*policy brief*). Namun, kegiatan ini juga akhirnya tidak bisa terlaksana, selain terkendala penyesuaian waktu dengan pejabat pemerintah daerah, juga fasilitator yang sedianya memfasilitasi kegiatan penting fase ini, punya kesibukan yang tidak bisa ditunda.

Capaian-capaian Penting yang Berhasil Diwujudkan

Kegiatan 1.1 berupa FGD parapihak yang dilaksanakan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep serta parapihak untuk mendorong regulasi pengelolaan kawasan karst Maros-Pangkep yang lestari. Hasil FGD merekomendasikan akan pemerintah dua kabupaten ini melakukan moratorium pemberian izin industri pertambangan. Selain mendorong pengembangan ekowisata sebagai basis ekonomi alternatif dalam upaya melindungi dan melestarikan kawasan karst Maros dan Pangkep.

Kegiatan 1.5 yakni seri diskusi bulanan dengan tema perlindungan dan pelestarian kawasan karst Maros-Pangkep memberikan pemahaman kepada kalangan muda yang berkecimpung dalam organisasi masyarakat sipil yang memiliki keinginan bersama mendorong pengelolaan kawasan karst Maros-Pangkep berbasis pengembangan ekowisata. Selain itu, menginginkan adanya kebijakan yang jelas tentang status kawasan karst dengan mengatur tata kelola kawasan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Perubahan Asumsi dan Resiko, Serta Respon/Tindakan Lembaga

Salah satu hasil program ini yakni diasumsikan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep tidak akan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan upaya pelestarian dan perlindungan kawasan karst Maros-Pangkep dengan keragaman hayati di dalamnya. Asumsi ini kemudian dipengaruhi adanya risiko pencapaiannya karena dua SKPD target yakni Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM tidak lagi berada di Maros dan Pangkep yakni “dilebur” ke pemerintah provinsi akibat implementasi UU No.23 Tahun 2014. Untuk mengantisipasi masalah ini, JURnaL Celebes kemudian terlibat dalam kegiatan pembentukan UPT Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Karst Maros-Pangkep. Namun, hingga akhir program, institusi yang baru dibentuk ini belum melakukan aktivitas operasional.

Kaitan antara Capaian Saat Ini Dengan (kontribusi terhadap) Tujuan Akhir (proyek)

Rekomendasi yang dicapai pada kegiatan output yakni Kegiatan 1.1, 1.2, dan 1.5 memberikan kontribusi pada tujuan akhir program, yakni adanya kertas kebijakan (*policy brief*) yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros, serta disosialisasikan kepada parapihak. Namun, *policy brief* dan sosialisasi parapihak tidak sempat dilaksanakan karena telah mencapai batas waktu pelaksanaan kegiatan.

III. CAPAIAN

A. Objective :

Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati KBA Bantimurung-Bulusaraung melalui kebijakan dan program yang selaras dengan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Karst Maros-Pangkep

Objective telah dicapai oleh program dengan terpenuhinya indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah di Kabupaten Maros Kabupaten Pangkep untuk mengintegrasikan isu konservasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya kebijakan atau program SKPD yang melaksanakan isi Rencana Aksi Karst Maros-Pangkep.

Indikator 1 dipenuhi melalui capaian kegiatan FGD pemerintah daerah dan parapihak, seri diskusi bulanan, dan perumusan kajian awal. Dalam kegiatan ini direkomendasikan antara lain adanya alternatif pengelolaan kawasan karst bukan hanya untuk eksploitasi sumber daya tambang, tetapi pengembangan ekowisata sebagai alternatif mengelola kawasan karst secara berkelanjutan.

Indikator 2 tidak dicapai karena beberapa kegiatan yang untuk memenuhi capaian ini tidak sempat dilaksanakan.

B. Output

Output 1 telah dicapai oleh program ini, yakni “Meningkatkan kapasitas pemerintah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati di KBA Bantimurung-Bulusaraung”. Indikator output 1 yang pertama adalah “Aparat pemerintah Kabupaten dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Bappeda memahami nilai penting ekosistem karst dan isi Rencana Aksi Karst Maros-Pangkep.” Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan aktivitas:

1. FGD pemerintah daerah dan parapihak. Kegiatan FGD dilaksanakan satu kali, masing-masing di Maros dan Pangkep dengan peserta dari unsur pemerintah daerah dan parapihak. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Peserta kegiatan ini berasal dari SKPD parapihak terkait. Dalam kegiatan ini, peserta diskusi merekomendasikan antara lain perlunya regulasi yang mengatur tata kelola kawasan karst Maros-Pangkep secara lestari dan berkelanjutan. Selain itu pemanfaatan kawasan karst sebagai ekowisata yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola. Peserta juga meminta review kembali batas-batas yang jelas antara kawasan kelola dan kawasan yang dilestarikan.
2. Merumuskan kajian awal untuk Kabupaten Pangkep. Peserta kegiatan ini adalah perwakilan pemda Pangkep, akademisi, dan NGO. Pada kegiatan yang melibatkan SKPD di Pemerintah Kabupaten Pangkep ini juga merekomendasikan adanya regulasi khusus pengelolaan kawasan karst serta pengelolaan ekowisata di kawasan karst.
3. Serial diskusi bulanan yang dilaksanakan di Maros dan Pangkep. Kegiatan seri diskusi dilaksanakan sebanyak tiga kali di Pangkep dan satu kali di Maros. Peserta kegiatan ini antara lain dari organisasi masyarakat sipil, media massa, dan unsur pemerintah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan semi-informal di warung kopi ini menarik banyak minat peserta. Jumlah peserta yang

hadir setiap diskusi selalu melebihi target. Peserta diskusi memberikan banyak rekomendasi dari hasil diskusi, di antaranya mengajukan usulan untuk mendorong pengelolaan ekowisata di kawasan karst, perbaikan dan penambahan regulasi, membuka akses dan pelibatan masyarakat untuk pengelolaan kawasan karst secara berkelanjutan di Maros dan Pangkep.

Indikator yang kedua dari output 1 adalah “Aparat pemerintah kabupaten mampu menjabarkan isi Rencana Aksi Pengelolaan Karst Maros-Pangkep ke dalam kebijakan daerah dan atau sebagai program SKPD.” Indikator ini belum terpenuhi karena ada kegiatan yang sarannya memenuhi indikator ini tidak sempat dilaksanakan.

IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas (tidak perlu diisi apabila program TIDAK menysar pada Arahans Strategis 1)

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen verifikasi
	(perburuan, perdagangan)	(jumlah ancaman turun dengan prosentasi tertentu pada saat akhir program)	(Survey/monitoring baseline dan endline)

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi

3. Perlindungan Kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	Taman Nasional	43.700 hektar	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004.

4. Penerima Manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat (*silahkan tera checklist pada tiap kolom yang relevan*)

Nama Komunitas	Jenis Komunitas							Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
	Ekonomi Subsisten	Small landowners	Masyarakat hukum adat/komunitas lokal	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Komunitas Perkotaan	Lainnya	50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa
	V	V				V	V	V			

b. Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih		
Meningkatnya ketersediaan pangan		
Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik)		
Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim		
Kepemilikan lahan yang jelas		
Pengakuan atas kearifan lokal		
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan		
Peningkatan akses atas jasa lingkungan		

Pelatihan (sebutkan jenis pelatihan yang didapat oleh penerima manfaat)		
Lain-lain Peningkatan kapasitas FGD, seri diskusi bulanan.	125	28
Total Penerima Manfaat	125	28

5. Regulasi/kebijakan lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan

6. Jaringan kerja/forum multipihak

(jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari program yang dilaksanakan. Jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian program, contoh : forum pengelolaan daerah tangkapan air, yang bertujuan sebagai forum komunikasi dan kerja bersama parapihak dalam pengelolaan daerah tangkapan air.)

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (nasional, lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan

7. Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi

V. PEMBELAJARAN

- *Kegiatan atau strategi apa yang berhasil dengan baik, dan apa yang kurang berhasil? Mengapa demikian dan apa dampaknya?*

Kegiatan seri diskusi bulanan dengan suasana informal berhasil dilaksanakan dan banyak menarik minat peserta. Setiap pelaksanaan kegiatan diskusi, jumlah peserta selalu melebihi target. Proses diskusi berlangsung dinamis karena antusias peserta.

Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah daerah/SKPD kurang berhasil dilaksanakan. Hal ini karena minimnya minat peserta yang diundang dari Pemda/SKPD untuk mengikuti kegiatan.

- *Adakah hal atau kegiatan yang di masa depan sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda (rekomendasi)?*

Kegiatan yang target pesertanya adalah unsur pemerintah daerah, sebaiknya pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan langsung pihak pemda/SKPD sebagai pelaksana kegiatan.

- *Deskripsikan dalam tabel berikut ini :*

Isu	Keberhasilan/Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan pengetahuan. b. Perubahan sikap c. Perubahan perilaku 				
<p>Proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Pelaksanaan 	<p>a. Perencanaan pelaksanaan kegiatan telah mengikuti jadwal (<i>time line</i>) yang direncanakan dalam program.</p> <p>b. Pelaksanaan sebagian kegiatan kurang berhasil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan sebagian kegiatan harus menyesuaikan dengan kesempatan pejabat/SKPD Pemda. - Ada SKPD target program yang sudah tidak 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya permohonan penambahan waktu tanpa biaya (NCE). - Kegiatan lokalatih, penyusunan <i>policy brief</i> tidak terlaksana. 	

		<p>ada di kabupaten yakni Dinas Kehutana dan Dinas ESDM, akibat implementasi UU No. 23 Tahun 2014.</p> <p>- Fasilitator kegiatan tidak punya waktu luang pada saat pelaksanaan kegiatan penyusunan policy brief dan lokalatih integrasi perencanaan pembangunan.</p>		
--	--	--	--	--

VI. STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan : 114.168.000
- b. Pengeluaran : 78.378.186
- c. Saldo : 35.789.814